



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 08 September 2020

Halaman: 4

Jangan Biarkan Intoleransi Terus Merebak di DIY

TAJUK

Intoleransi masih menjadi pekerjaan berat yang harus diselesaikan oleh DIY. Berdasarkan catatan Setara Institute, dalam lima tahun terakhir, intoleransi di provinsi ini meningkat. DIY termasuk dalam 10 besar daerah dengan kasus intoleransi tertinggi.

Tindakan intoleransi tidak saja dipicu oleh motif agama atau kesukuan, tapi juga ekonomi dan politik. Pembubaran acara keagamaan menjadi pemberitaan yang cukup dominan selama beberapa tahun terakhir.

Intoleransi dipengaruhi beberapa faktor, yakni situasi sosial serta sikap pemerintah DIY. Beberapa kelompok masyarakat belum sepenuhnya terbuka menerima perbedaan. Pemahaman agama yang eksklusif, meski dianut oleh sedikit kelompok, kerap mencuat dan memengaruhi kehidupan masyarakat dalam skala luas. Pemahaman bersama tentang kebinekaan masih harus didorong agar masyarakat bisa hidup berdampingan dan saling menghargai.

Sikap pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini juga harus diperbaiki. Pemda perlu berkoordinasi dengan aparat hukum agar tegas dalam menindak kasus-kasus intoleransi karena instrumen hukum untuk menindak kasus intoleransi sebenarnya sudah cukup lengkap.

Konstitusi kita sudah mengamankan kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi semua penduduknya. Namun, jaminan dari negara kadangkala belum cukup. Dalam banyak kasus pembubaran kegiatan keagamaan atau pembubaran kegiatan berkumpul, aparat penegak hukum sering menggunakan pendekatan ketertiban.

Aparat hukum lebih kerap mengambil jalur aman semisal meminta suatu acara keagamaan yang berpotensi memicu konflik untuk tidak dilaksanakan, alih-alih melindungi keamanannya. Padahal, semestinya aparat penegak hukum bisa melindungi dan menjamin kelompok minoritas untuk mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam konstitusi.

DIY sejak lama sudah dikenal sebagai wilayah yang terbuka. Perannya sebagai kota pendidikan, tempat banyak kampus berdiri, membuat masyarakat menerima semua orang dari beragam latar belakang. Sayangnya, eksklusivisme berkeyakinan kerap kali menghambat keterbukaan ini. Kampanye dan dialog untuk menjaga kebersamaan dan toleransi harus terus digaungkan.

Di sisi lain, pemerintah dan penegak hukum harus mengubah orientasi, tidak lagi menggunakan pendekatan ketertiban. Hak-hak masyarakat yang dijamin konstitusi harus dijaga. Sementara, upaya segelintir kelompok yang melanggar hak warga negara lain harus dicegah. Kelompok intoleran juga harus ditindak sesuai undang-undang yang berlaku. Jangan biarkan DIY, yang kerap dikenal sebagai miniatur Indonesia, menjadi tempat intoleransi merebak.

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Instansi

1.

2.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Kesatuan Bangsa	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005